



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2022/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOHANITA RINI KRISTIANI
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 105533

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.705.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 624 m2/200 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 625.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 418 m2/80 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 1901 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 665.000.000
4. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
5. Tanah Seluas 192 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 207.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
4. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 50.600.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 301.193.388**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.264.293.388

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.264.293.388

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.